



ISSN No. 2088-2815
No. 7, Tahun 2014

GOVERNANCE

Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat

1. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi) Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
2. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. Oleh: Mordekai Pinatik
4. KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA POPOO KECAMATAN RANOIAPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh: HIZKIA SARAYAR
5. PERANANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh: JELLY MAMANGKEY
6. PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU. Oleh: Reonald Steven Maabuat
7. KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA. Oleh: MAIKEL YIGIBALOM
8. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN IWANEA. Oleh: Timothy Gabrieli Baptis Lumapow
9. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG. Oleh: FRENNY RUMUAT
10. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI. Oleh: RENALTO TUMARAH
11. EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG. Oleh: LIDYA CHRISTINE MONTUNG
12. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN REREWOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA. Oleh: JULIO ARUPERES
13. Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Oleh: INDRA MEREV WAANI
14. PERAN KEPEMIMPINAN GAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT). Oleh: Jimmy Langkay
15. KEPEMIMPINAN GAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Oleh: ZULFIHKRAM HARAS
16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN (E.KTP) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kantor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua). Oleh: YUSTINUS SAPARI



9 772088 281985

GOVERNANCE

NO. 7 TAHUN III, 2014

Pelindung
DEKAN FISIP UNSRAT
Drs. Philep Regar, MSi

Penanggung Jawab
Dra Madien Lapien MSi

Pemimpin Redaksi
DR. Michael Mementu, MA

Sekretaris Redaksi
Neni Kumayas, SIP, MA

Dewan Redaksi
Drs Burhan Niode MA
DR. Daud M. Liando, S.Sos, MSi
Donald Monintja, S.Sos, MSi
Neni Kumayas, SIP, MA
Dra. Daisy Posumah, MIA
Drs Johnly Pangemanan, MSi

Sekretariat :
Alfons Kimbal S. Sos, MSi
Trintje Lambey, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi
Ardiles Mewoh SIP, MSi
Maxi Egetan SIP, MSi
Frangky Rengkung, SIP

Alamat
Jl. Kampus Bahu 95115
Telp. 0431-862586
Email. governance.unsrat@gmail.com

1. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi). Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
2. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. Oleh : Mordekai Pinatik
4. KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA POOPO KECAMATAN RANOIAPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh : HIZKIA SARAYAR
5. PERANANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN . Oleh : JELLY MAMANGKEY
6. PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU. Oleh : Reonald Steven Maabuut
7. KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA. Oleh : MAIKEL YIGIBALOM
8. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA. Oleh : Timothy Gabriel Baptis Lumapow
9. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG. Oleh : FRENNY RUMUAT
10. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI. Oleh : RENALTO TUMARAH
11. EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. Oleh : LIDYA CHRISTINE MONTUNG
12. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN REREWOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA. Oleh : JULIO ARUPERES
13. Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Oleh : INDRA MEREV WAANI
14. PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DIKANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT). Oleh : Jimmy Langkay
15. KEPEMIMPINAN CAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Oleh : ZULFIHKRAM HARAS.
16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN (E.KTP) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kantor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua). Oleh : YUSTINUS SAPARI



9 772088 201985

Pengantar Redaksi

Kali ini Jurnal Ilmiah Governance tampil dengan tulisan yang melibatkan mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan studi akhir yakni Skripsi dan Tesis. Keterlibatan mahasiswa dalam rangka membuat lulusan perguruan tinggi lebih berkualitas dan menghasilkan karya tulisan yang bisa diakses oleh publik atau dipublikasikan. Mengingat juga negeri ini masih kekurangan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal, dibandingkan dengan beberapa negara yang setara dengan Indonesia. Oleh karena itu Jurnal Governance memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya yang terpublikasi.

Kesempatan kali ini jurnal governance menghasilkan karya-karya pemikiran intelektual, produk perguruan tinggi. Berbagai hal menyangkut politik pemerintahan dibahas dalam tulisan-tulisan jurnal ini. Sekiranya semua dapat bermanfaat dalam membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Semoga pembaca mendapat manfaat dari Jurnal ini

SAMBUTAN DEKAN FISIP UNSRAT

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Mengena Dasar, Fungsi, dan Tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Seangkan tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Semua yang tersirat dalam Dasar, Fungsi dan Tujuan Pembangunan Nasional ini adalah visi yang perlu digapai oleh institusi Universitas Sam Ratulangi, khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai bagian dari komponen utama Universitas Sam Ratulangi dalam menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya, apalagi era globalisasi dan keberadaan Sulut strategis di pasifik sangat membutuhkan SDM yang dapat mengembangkan potensi unggulnya. Karena ini bagaimana kita melakukan cara-cara yang tepat untuk membentuk peserta didik yang berhasil guna.

Dalam rangka itu, kualitas tenaga akademiknya harus selalu diberdayakan agar dapat membina mahasiswa dengan baik. Jurnal Ilmiah Governance Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat ini adalah salah satu wadah yang tepat mengasah ketajaman sumber daya tenaga akademik di lingkungan FISIP Unsrat. Seyogyanya Jurnal ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dekan,

Drs. Philep M. Regar, MSi

SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNSRAT

Tradisi akademis yang baik adalah bagaimana kita mengembangkan kebiasaan berdiskusi, meneliti dan menulis. Kebiasaan ini harus berjalan terus menerus yang nantinya bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian bagi kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Karena itu para akademisi di Universitas Ratulangi khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat dituntut untuk dapat berusaha selalu meningkatkan kemampuan sumber dayanya dalam menghasilkan karya-karya hasil analisisnya terhadap persoalan-persoalan politik pemerintahan di sekitar kita. Media Jurnal Governance yang terbit secara berkala ini adalah wadah yang membantu para akademisi menuangkan karya-karya pikirnya dengan metode ilmiah.

Semoga segenap akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai ilmuwan yang sangat diharapkan, untuk dapat menulis karya ilmiah yang produktif.

Ketua Jurusan,

Dra. Marlien Lopian, MSi

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

(suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi)

Oleh:
T. A. M. Ronny Gosal

Kehidupan politik tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya politik di bangun dari dua kata yaitu budaya dan politik. budaya adalah segala sesuatu yang di pelajari, di alami, dan diwariskan bersama secara sosial yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku para anggota suatu masyarakat. Sedangkan, secara umum politik dapat di artikan sebagai berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/Negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga Negara.

Budaya politik yang berkembang sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi melalui suatu dinamika yang sangat bercorak dan beraneka ragam, dimana budaya feodal dan paternalistik kental mewarnai budaya politik masyarakat, sampai dengan partisipan, dan apatis. Artikel ini berusaha untuk menelaah kembali budaya politik pada tatanan demokrasi yang berkembang di Indonesia. Budaya politik yang ada di kalangan elit sampai dengan masyarakat biasa terkadang saling bersinggungan, sehingga membangun kelompok-kelompok inklusif tertentu yang menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keyword: Perkembangan, Budaya Politik, Partisipan.

Pendahuluan

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengankelompok massa. Negara Indonesia sebagai negara demokratis membutuhkan warga negara yang berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional. Warga negara yang berciri demikian inilah yang memang dibutuhkan bagi sistem politik demokrasi di Indonesia. Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik.

Budaya politik sering diartikan sebagai sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan, warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol (seperti bendera, bahasa, dan lembaga-lembaga politik) yang dimilikinya. Dalam masyarakat manapun sudah tentu terdapat sikap-sikap ataupun kepercayaan yang perlu dijadikan sebagai patokan dari pada tingkah laku anggota-anggotanya. Dengan kata lain budaya politik diartikan sebagai bagian dari pada kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejala Masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional.

Sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai era reformasi saat ini dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia, negara kita dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan demokrasi dibagi dalam empat masa. Pertama, masa Republik Indonesia I (1945-1959) atau yang lebih dikenal dengan era Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau yang lebih dikenal dengan era Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin. Ketiga, masa Republik

Indonesia III (1965-1998) atau yang lebih dikenal dengan era Orde Baru atau Demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) atau yang lebih dikenal dengan era Reformasi.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dari setiap masa ke masa. Perkembangan demokrasi tersebut mempengaruhi pula stabilitas sistem politik Indonesia. Karena itu sangat penting untuk mengkaji berhasil atau tidaknya suatu rezim yang sedang atau telah berkuasa, diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menjelaskan kehidupan ketatanegaraan. Dalam kajian ini adalah terkait dengan kehidupan politiknya. Ada dua kerangka kerja yang sering digunakan oleh para pengamat politik untuk melihat bagaimana kinerja sistem politik suatu negara. Karena salah satu sifat penting sistem politik adalah kemampuannya untuk dibedakan dengan sistem politik lainnya, seperti organisme dan individu misalnya. Kedua kerangka kerja tersebut adalah pendekatan struktural-fungsional dan pendekatan budaya politik. Dengan pendekatan struktural-fungsional akan dapat diketahui bagaimana struktur-struktur maupun fungsi-fungsi politik suatu sistem politik bekerja. Sedangkan dengan pendekatan budaya politik akan dapat diketahui bagaimana perilaku aktor-aktor politik dalam menjalankan sistem politik yang dianut oleh negara masing-masing, dalam hal ini adalah elite maupun massanya (Budi Winarno, 2008:18).

Karena pentingnya mempelajari perkembangan sistem politik di negara kita ini, maka dalam tulisan kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas mengenai perkembangan sistem politik Indonesia dari mulai era Demokrasi Parlementer, era Demokrasi Terpimpin, era Demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah era Reformasi dengan menggunakan kerangka kerja pendekatan budaya politik.

Pembahasan

Perkembangan Budaya Politik

1. Era Demokrasi Parlementer (1945-1950)

Budaya politik yang berkembang pada era Demokrasi Parlementer sangat beragam. Dengan tingginya partisipasi massa dalam menyalurkan tuntutan mereka, menimbulkan anggapan bahwa seluruh lapisan masyarakat telah berbudaya politik partisipan. Anggapan bahwa rakyat mengenal hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya menyebabkan tumbuhnya deviasi penilaian terhadap peristiwa-peristiwa politik yang timbul ketika itu (Rusadi Kantaprawira, 2006:190).

Percobaan kudeta dan pemberontakan, di mana dibelakangkannya sedikit banyak tergambar adanya keterlibatan keikutsertaan rakyat, dapat diberi arti bahwa kelompok rakyat yang bersangkutan memang telah sadar, atau mereka hanya terbawa-bawa oleh pola-pola aliran yang ada ketika itu. Para elite Indonesia yang disebut penghimpun solidaritas (solidarity maker) lebih nampak dalam periode demokrasi parlementer ini. Walaupun demikian, suatu itu terlihat pula munculnya kabinet-kabinet yang

terbentuk dalam suasana keselang-selingan pergantian kepemimpinan yang mana kelompok administrator memegang peranan. Kulminasi krisis politik akibat pertentangan antar-elite mulai terjadi sejak terbentuknya Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan PRRI pada tahun 1958 (Rusadi Kantaprawira, 2006: 191). Selain itu, dengan gaya politik yang ideologis pada masing-masing partai politik menyebabkan tumbuhnya budaya paternalistik. Adanya ikatan dengan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda secara ideologis mengakibatkan fungsi aparaturnegara yang semestinya melayani kepentingan umum tanpa pengecualian, menjadi cenderung melayani kepentingan golongan menurut ikatan primordial. Selain itu, orientasi pragmatis juga senantiasa mengiringi budaya politik pada era ini.

2. Era Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959-1965)

Budaya politik yang berkembang pada era ini masih diwarnai dengan sifat primordialisme seperti pada era sebelumnya. Ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penpres No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Tokoh politik memperkenalkan gagasan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom). Gagasan tersebut menjadi patokan bagi partai-partai yang berkembang pada era Demokrasi Terpimpin. Dalam kondisi tersebut tokoh politik dapat memelihara keseimbangan politik (Rusadi Kantaprawira, 2006: 196).

Selain itu, paternalisme juga bahkan dapat hidup lebih subur di kalangan elit-elit politiknya. Adanya sifat kharismatik dan paternalistik yang tumbuh di kalangan elit politik dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang bertikai, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan. Dengan demikian muncul dialektika bahwa pihak yang kurang kemampuannya, yang tidak dapat menghimpun solidaritas di arena politik, akan tersingkir dari gelanggang politik. Sedangkan pihak yang lebih kuat akan merajai/menguasai arena politik. Pengaturan soal-soal kemasyarakatan lebih cenderung dilakukan secara paksaan. Hal ini bisa dilihat dari adanya teror mental yang dilakukan kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang kontra revolusi ataupun kepada aliran-aliran yang tidak setuju dengan nilai-nilai mutlak yang telah ditetapkan oleh penguasa (Rusadi Kantaprawira, 2006:197).

Dari masyarakatnya sendiri, besarnya partisipasi berupa tuntutan yang diajukan kepada pemerintah juga masih melebihi kapasitas sistem yang ada. Namun, saluran inputnya dibatasi, yaitu hanya melalui Front Nasional. Input-input yang masuk melalui Front Nasional tersebut menghasilkan output yang berupa output simbolik melalui bentuk rapat-rapat raksasa yang hanya menguntungkan rezim yang sedang berkuasa. Rakyat dalam rapat-rapat raksasa tidak dapat dianggap memiliki budaya politik sebagai partisipan, melainkan menunjukkan tingkat budaya politik kaula, karena diciptakan atas usaha dari rezim.

3. Era Demokrasi Pancasila (Tahun 1966-1998)

Gaya politik yang didasarkan primordialisme pada era Orde Baru sudah mulai ditinggalkan. Yang lebih menonjol adalah gaya intelektual yang pragmatik dalam penyaluran tuntutan. Dimana pada era ini secara material, penyaluran tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisi besar (cardinal coalition) antara Golkar dan ABRI, yang pada hakekatnya berintikan teknokrat dan perwira-perwira yang telah kenal teknologi modern (Rusadi Kantaprawira, 2006: 200).

Sementara itu, proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer yang terbatas sebagaimana terjadi dalam tipologi masyarakat birokrasi. Akibatnya masyarakat hanya menjadi objek mobilisasi kebijakan para elit politik karena segala sesuatu telah diputuskan di tingkat pusat dalam lingkaran elit terbatas.

Kultur ABS (asal bapak senang) juga sangat kuat dalam era ini. Sifat birokrasi yang bercirikan patron-klien melahirkan tipe birokrasi patrimonial, yakni suatu birokrasi dimana hubungan-hubungan yang ada, baik intern maupun ekstern adalah hubungan antar patron dan klien yang sifatnya sangat pribadi dan khas.

Dari penjelasan diatas, mengindikasikan bahwa budaya politik yang berkembang pada era Orde Baru adalah budaya politik subjek. Dimana semua keputusan dibuat oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya bisa tunduk di bawah pemerintahan otoriterianisme Soeharto. Kalaupun ada proses pengambilan keputusan hanya sebagai formalitas karena ada keputusan kebijakan publik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer.

Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tak terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah: proyek di pegang pejabat, promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku (surat sakti), anak pejabat menjadi pengusaha besar, memanfaatkan kekuasaan orang tuanya dan mendapatkan perlakuan istimewa, anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik.

4. Era Reformasi (Tahun 1998-Sekarang)

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat.

Birokrasi publik masih mempersepsikan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai abdi yang bersedia melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para pejabat dan elit politik yang lebih memperjuangkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Dengan menguatnya budaya paternalistik, masyarakat lebih cenderung mengejar status dibandingkan dengan kemakmuran. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.

Budaya Politik Partisipan

Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratis, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Budaya politik yang demokratis ini menyangkut "suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi".

Masyarakat dalam budaya politik ini memahami bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Masyarakat memiliki kebangsaan dan kemauan untuk berperam dalam sistem politik. Selain itu, masyarakat dalam budaya politik ini memiliki keyakinan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan publik dan membentuk kelompok untuk melakukan protes jika pelaksanaan pemerintah tidak transparan. Dalam budaya politik partisipan ini, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadinya hubungan yang harmonis antara warga negara dan pemerintah yang ditunjuk oleh tingkat kompetensi politik (penyelesaian sesuatu secara politik), dan tingkat efficacy (keberdayaan). Dapat dikatakan bahwa tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi secara politik. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek, baik umum, input, maupun output secara pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.

Beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi: Kesadaran pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar; Bertanggung jawab atas tindakan yang di perbuat; Memenuhi kewajiban moral dan hukum sebagai anggota masyarakat demokratis.
- b. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik. Tanggung jawab ini antara lain meliputi: Memelihara atau menjaga diri;

Memberi nafkah dan merawat keluarga; Mengasuh dan mendidik anak. Didalamnya termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, seperti: menentukan pilihan (voting); membayar pajak; melayani masyarakat; melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.

- c. Menghormati harkat dan marabat kemanusiaan setiap individu. Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersifat sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga Negara. Mengikuti aturan "prinsip mayoritas" namun tetap menghargai hak-hak minoritas untuk berbeda pendapat.
- d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Karakter ini merupakan standar informasi sebelum: menentukan pilihan (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik: terlibat dalam diskusi yang santun dan serius; memegang kendali dalam kepemimpinan bila di perlukan; membuat evaluasi tentang kapan saaatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara harus di kesampingkan demi memenuhi kepentingan publik; mengavaluasi kapan seseorang karena kewajiban atau prinsip-prinsip konstitusional di haruskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu.
- e. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat. Karakter ini meliputi: sadar informasi dan kepekaan terhadap unsur-unsur publik; melakukan penalaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional; memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tadi; mengambil langkah-langkah yang di perlukan bila ada kekurangannya. Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara yang damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan tidak bijaksana.

Budaya politik partisipan adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi. Berdasar hal ini maka ciri-ciri budaya politik partisipan adalah sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik
- b. Kesadaran bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis
- c. Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya (kewajibannya) dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya
- d. Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output ataupun posisi dirinya sendiri
- e. Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi seperti halnya penjual dan pembeli. Warga dapat

menerima berdasar kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri

Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan

Sebagai komunitas warga negara, hendaknya memiliki peran besar (partisipasi aktif) untuk melakukan perubahan politik yang lebih baik dan berbudaya. Melalui sarana pemilihan umum, kita dapat menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong perubahan sosial politik, politik ekonomi, budaya, dan lain-lain ke arah yang lebih baik dan demokratis melalui pemerintah yang dipilih melalui pemilu, secara damai dan beradab (berbudaya). Semua itu dimaksudkan sebagai upaya melakukan pendidikan budaya politik partisipan (rakyat) yang lebih luas karena dengan demikian akan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menentukan pilihan dalam pemilu secara arif, bijaksana, kritis, dan rasional. Dalam setiap tahapan pemilu, kita sebagai simpatisan (kader) partai politik, ataupun kaum terpelajar tidak ada larangan untuk mengikutinya. Namun demikian, hal yang perlu dikedepankan dalam kampanye adalah situasi damai karena dalam kampanyenya sering kali terjadi persinggungan antar massa pendukung dari partai politik (simpatisan dan kader) partai politik. Bermula dari saling mengejek dan saling hina di antara mereka ketika berpapasan di jalan raya dalam situasi kampanye, perkelahian antar massa pendukung partai politik seringkali terjadi. Untuk mewujudkan situasi seperti itu dibutuhkan toleransi yang besar terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik dan juga sikap anti kekerasan. Masyarakat yang ingin aktif dalam kampanye harus sadar bahwa tindakan brutal, kekerasan, dan keseluruhan hanya akan merusak situasi pemilu yang demokratis dan beradab. Untuk itu, kita harus sadar bahwa brutalisme, kekerasan, dan kerusuhan yang mengiringi proses pemilu sebenarnya adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokratis dan budaya politik bangsa Indonesia.

Suatu pemerintahan dengan budaya politik yang bertentangan dengan semangat pembangunan politik bangsa yang transparan (terbuka) apabila dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahannya tidak terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga tidak mudah di akses oleh masyarakat sebagai warga bangsa yang membutuhkan. Budaya politik feodalisme yang terjadi adalah merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana seorang pemimpin bangsawan memiliki anak buah banyak yang juga masih dari kalangan bangsawan, tetapi lebih rendah mereka biasa disebut vazal. Dalam penggunaan bahasa sekalipun, sering kali digunakan untuk menunjuk para perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang zalim, seperti kolot, selalu ingin di hormati atau bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak di tinggalkan, artinya sudah banyak tidak sesuai lagi dengan pengertian politik yang sesungguhnya. Realitas budaya politik masih menjadi kendala bagi proses pendidikan politik karena masih di warnai oleh kuatnya pengaruh nilai-nilai feodalisme, primordialisme, dan paternalisme

berlebihan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi itu di perparah dengan makin sulitnya mencari figur-figur yang dapat diteladani dalam kepemimpinan nasional. Keadaan ini di rasakan mempersuli mahasiswa dan kaum yang terpelajar dalam mengoperasionalkan konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam khasanah budaya bangsa. Banyak kalangan berpendapat, di era Orde Reformasi ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetap hidup dan bahkan makin berkembang (wajah baru KKN). Pemilihan pejabat publik, baik di pemerintahan maupun BUMN, masih menggunakan cara lama; siapa dekat dia dapat. Pertimbangan profesional bukannya acuan utama. Akibat KKN, hartarepublik telah menjadi "barang jarahan" yang hanya menguntungkan sedikit orang. Tindakan KKN memiliki kecenderungan "terstruktur" dalam kehidupan masyarakat politik.

Tentang perubahan struktur ini, para ilmuwan sosial memasuki perdebatan yang melelahkan, bahkan hampir tidak dapat diselesaikan. Dari kacamata strukturalisme, perilaku individu akan ditentukan oleh kondisi strukturalnya (structure conduct performance). Sebaliknya dari kacamata individualisme, struktur adalah hasil perilaku para aktor politik. Titik tengahnya adalah menganggap bahwa aksi para individu dan struktur adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan (dualitas). Aksi individu hanya bisa dipahami dari dan sebaliknya struktur hanya biasa dijelaskan dari aksi para individunya. Dalam kacamata strukturasi ini, tiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan aksi, tetapi dalam kerangka "aturan main" tertentu yang mempengaruhinya. Dalam pengertian neoinstitusionalisme, ada "roh" yang memengaruhi cara pandang (sense making) para individu yang akan menghalangi (constraining) atau mendorong (enabling) tindakan tertentu.

Suatu hal yang patut kita sayangkan adalah hingga saat ini "belum pernah" atau "belum ada" contoh yang baik tentang penegakan perilaku KKN. Masih banyak birokrat dan pejabat tinggi negara yang terang-terangan melakukan praktik ini. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila semua orang berlomba-lomba untuk melakukan hal yang tampaknya bersifat profesional. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi orang berperilaku tidak mau melibatkan diri dalam politik (partisipan). Alasannya sebagai berikut: pertama, orang mungkin kurang tertarik dalam politik jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik, dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya. Kedua, orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas dengan keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seorang tersebut tidaklah menjadi persoalan. Ketiga, seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya. Keempat, seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa hasil-hasilnya relatif akan memuaskan orang tersebut sekalipun ia tidak berperan di dalamnya. Kelima, jika pengetahuan seseorang tentang politik tersebut terlalu terbatas untuk dapat menjadi efek-

tif. Keenam, semakin besar kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidup, semakin kecil kemungkinan bagi seseorang untuk terlibat dalam politik.

Kesimpulan

1. Budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis. Hal ini disebabkan oleh karena adopsi sistem politik yang hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya, namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.
2. Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratis, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Budaya politik partisipan adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya mendekati satu atau dapat dikatakan tinggi.

Saran

Setiap warga Negara yang dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak, dimana proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik, maka diharapkan kepada warga negara yang berbudaya politik partisipan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- H.I Rahman A. 2007, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cetakan ke X.
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'ood Mohtar dan Andrew Mac Colin. 2000, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahman. A Syahril, MA, Dkk. 2000. Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjamsuddin Nazaruddin, 1993, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo.